

Bab IX.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENCURAHAN TENAGA KERJA DAN PENDAPATAN

Prajogo Utomo Hadi

PENDAHULUAN

Sasaran pembangunan ekonomi Indonesia jangka panjang adalah terbentuknya struktur ekonomi yang seimbang dan terkait antara industri dan pertanian. Sektor industri diharapkan mampu menyerap surplus tenaga kerja sektor pertanian sedangkan sektor pertanian diharapkan mampu menyerap hasil-hasil sektor industri. Dengan demikian diharapkan terciptanya pertumbuhan ekonomi dan penyediaan kesempatan kerja yang tinggi.

Beberapa perubahan penting yang dapat diamati dari hasil strategi pembangunan yang telah diterapkan, antara lain:

1. Laju pertumbuhan PDB Indonesia periode 1971-1983 rata-rata 7,09 persen dimana pertumbuhan PDB sektor pertanian 3,73 persen dan sektor non pertanian 8,95 persen per tahun. Data pertumbuhan ini memperlihatkan bahwa struktur ekonomi Indonesia makin berat ke sektor non-pertanian. Pada tahun 1983 sektor non-pertanian memberikan kontribusi sebesar 70 persen dalam pembentukan PDB sedangkan tahun 1971 hanya mencapai 56 persen.

2. Persentase jumlah angkatan kerja (AK) yang bekerja di sektor non pertanian terus meningkat, yaitu dari 33,7 persen pada tahun 1971 menjadi 45,2 persen pada tahun 1980. Sektor non pertanian yang menonjol dalam penyerapan tenaga kerja (TK) adalah sektor perdagangan, sektor jasa masyarakat dan sektor industri pengolahan. Ini menunjukkan bahwa sektor sekunder dan sektor tersier dalam perekonomian Indonesia terus berkembang.

3. Laju pertumbuhan penduduk di kota selama tahun 1971-1980 jauh lebih cepat dibanding laju pertumbuhan penduduk di pedesaan, yaitu masing-masing 5,22 persen dan 1,72 persen per tahun. Lebih cepatnya laju pertumbuhan penduduk di kota menyebabkan meningkatnya persentase jumlah penduduk kota pada tahun 1980 dibanding tahun 1971, yaitu masing-masing 22,4 persen dan 17,5 persen (Kasryno, 1983).

Beberapa perubahan tersebut di atas menimbulkan pertanyaan, apakah: (1) sektor pertanian sudah tidak lagi merupakan 'klep pengaman' (safety valve) untuk menampung tambahan AK di pedesaan, (2) kemampuan sektor non pertanian makin tinggi dalam menampung AK pedesaan dan (3) kota mempunyai daya tarik yang makin kuat bagi AK pedesaan untuk bekerja?.

Tulisan ini ingin memberikan gambaran tentang: (1) jenis-jenis kegiatan di luar usahatani yang menyerap TK pedesaan, (2) peranan relatif kota bagi masyarakat pedesaan dalam menyerap AK, (3) pencurahan hari kerja dan pen-

dapatan masyarakat pedesaan dari kegiatan di luar-usahatani, dan (4) mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pencurahan TK dan pendapatan masyarakat pedesaan pada kegiatan diluar usahatani di 18 desa contoh Jawa Timur.

METODA ANALISA

Desa contoh dikelompokkan menjadi dua, yaitu : (1) desa dengan komoditi utama padi dengan luas panen per tahun lebih dari 50 persen total luas panen dan (2) desa dengan komoditi utama bukan padi, dimana luas panen padi kurang 50 persen. Masing-masing kelompok terdiri atas 9 desa contoh, dengan jumlah masing-masing rumah tangga (RT), 449 untuk kelompok 1 dan 450 untuk kelompok 2.

Untuk melihat pengaruh berbagai faktor terhadap pencurahan TK diluar usahatani dilakukan analisa kuantitatif. Dalam analisa ini ingin dilihat perbedaan: (a) intercept dan slope antara desa padi dengan desa non-padi, (b) intercept antara desa yang terdapat traktor dengan desa yang tidak terdapat traktor dan (c) intercept antara desa dengan komposisi pendidikan lebih baik (lulus SD keatas lebih dari 50%) dengan desa-desa dengan komposisi pendidikan kurang baik (lulus SD 50% ke bawah). Secara hipotetis, perbedaan-perbedaan tersebut dapat dilukiskan seperti pada Gambar 1 (Johnston, 1972 dan Supranto, 1984).

Perbedaan intercept antara desa yang terdapat traktor dengan desa yang tidak terdapat traktor dan antara desa yang komposisi pendidikannya lebih baik dengan desa yang kurang baik diduga akan mengikuti arah hubungan yang positif. Nilai intercept desa traktor dan desa pendidikan baik, diduga akan lebih besar dibandingkan dengan desa pasangannya ($a_1 > a_0$). Diperkirakan juga tidak akan terdapat perbedaan slope antara desa pasangan tersebut diatas ($b_1 = b_0$).

Untuk melihat perbedaan-perbedaan tersebut di atas, dibuat peubah boneka sebagai berikut :

D_p diberi nilai = 1 untuk desa dengan luas panen padi $> 50\%$ dan 0 untuk lainnya.

D_t diberi nilai = 1 untuk desa yang terdapat traktor dan 0 untuk lainnya.

D_e diberi nilai = 1 untuk desa yang penduduknya lulus SD keatas $> 50\%$ dan 0 untuk lainnya.

Hubungan matematis antara pencurahan TK dan pendapatan pada kegiatan diluar usahatani dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya digunakan model regresi-logaritma-ganda semacam Cobb Douglas, sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \ln Y = & \ln a_0 + a_p D_p + a_t D_t + a_e D_e + b_1 \ln Fm + b_1 (D_p \ln Fm) + b_2 \ln L \\ & + b_2 (D_p \ln L) + b_3 \ln W + b_3 (D_p \ln W) + b_4 \ln GI + b_4 (D_p \ln GI) \\ & + b_5 \ln IF + b_5 (D_p \ln IF) + b_6 \ln EI + b_6 (D_p \ln EI) + b_7 \ln P + b_7 \\ & (D_p \ln P) + b_8 \ln Sr + b_8 (D_p \ln Sr) \end{aligned}$$

dimana, Y = Pencurahan tenaga kerja atau pendapatan non-usahatani, Fm =

Jumlah anggota RT, L = Luas garapan lahan, W = Pendapatan bersih per hko, GI = Gini-index garapan lahan, IF = Persentase lahan beririgasi, EI = Jumlah lembaga ekonomi desa, P = Tingkat kepadatan penduduk agraris, Sr = Jarak desa ke pusat kabupaten terdekat, a_0 = Intercept, a_p = Differential intercept desa padi/non-padi, a_t = Differential intercept desa traktor/non-traktor, a_e = Differential intercept pendidikan, b_1 - b_8 = Koefisien elastisitas (slope), b_1 - b_8 = Differential slope desa padi/non-padi.

Untuk peubah Y dicoba dibuat variasi berupa: Kegiatan berburuh tani, yaitu menjual jasa TK kepada pihak lain pada kegiatan proses produksi pertanian dengan mendapat upah. Misalnya: mencangkul, membajak, menanam, menyang, memupuk, memanen, menggembala ternak, dan sejenisnya.

Kegiatan berburuh non-pertanian, yaitu menjual jasa TK kepada pihak lain pada kegiatan di luar proses produksi pertanian dengan mendapat upah. Misalnya: buruh industri, buruh bangunan, buruh angkutan dan sejenisnya.

Kegiatan usaha non-pertanian, yaitu kegiatan untuk mendapatkan penghasilan dengan menanamkan modal, baik dengan menggunakan tenaga luar keluarga maupun hanya TK keluarga. Misalnya: industri/kerajinan RT, berdagang, jasa, dan sejenisnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jumlah RT yang Bekerja Non-Usahatani

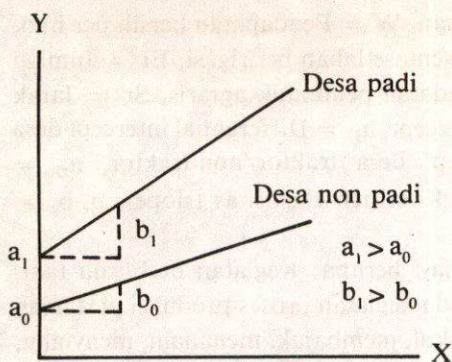
RT pada kegiatan di luar usahatani (Tabel 1) lebih dari 80 persen RT, baik di daerah padi maupun di daerah non-padi yang diteliti, tetapi di daerah padi total yang bekerja pada kegiatan di luar usahatani lebih banyak daripada di daerah non-padi, walaupun terdapat variasi menurut jenis kegiatan.

Tidak ada perbedaan yang berarti dalam jumlah RT contoh yang bekerja pada kegiatan berburuh tani dan usaha non-pertanian antara daerah padi dan di daerah non-padi. Sedangkan untuk kegiatan berburuh non-pertanian, di daerah padi lebih banyak daripada di daerah non-padi. Banyak di antara RT contoh yang

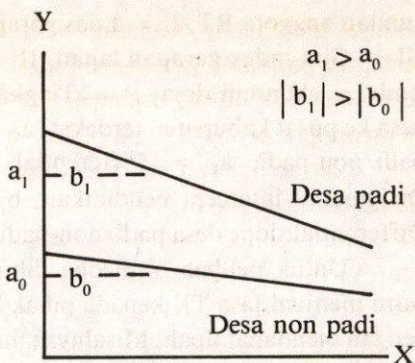
Tabel 1. Persentase Rumah Tangga Contoh Yang Bekerja Sebagai Buruh Dan Pada Kegiatan Non Usahatani.

Jenis Kegiatan	Daerah padi (n = 449)	Daerah non padi (n = 450)	Agregat (n = 899)
Berburuh tani	58,6	59,8	59,2
Non-Pertanian	69,9	66,4	68,2
a. B u r u h	37,6	28,2	32,9
b. U s a h a	54,1	55,6	54,8
Non-Usahatani	85,3	81,6	83,4

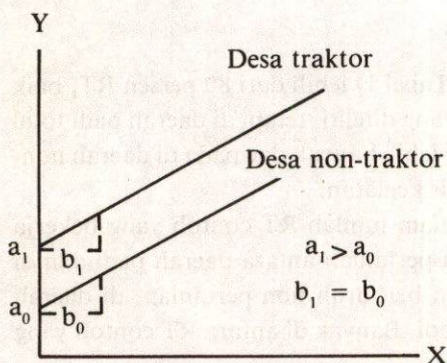
Keterangan: *) % terhadap n.



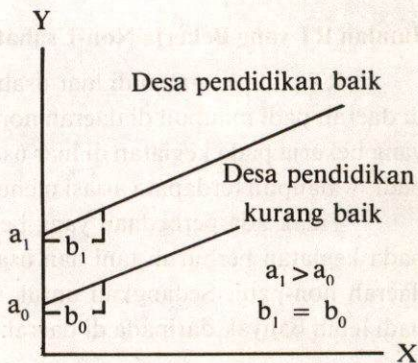
Gambar 1a. Perbedaan intercept dan slope antara desa padi dengan desa non-padi, bila arah hubungan positif.



Gambar 1b. Perbedaan intercept dan slope antara desa padi dengan desa non-padi, bila arah hubungan negatif.



Gambar 1c. Perbedaan intercept antara desa-desa yang terdapat traktor dengan desa-desa yang tidak terdapat traktor.



Gambar 1d. Perbedaan intercept antara desa-desa yang komposisi pendidikannya lebih baik dengan desa-desa yang kurang baik.

bekerja merangkap kegiatan berburuh tani dan kegiatan non-pertanian atau berburuh pada non pertanian dan berusaha. Dapat dikatakan bahwa masyarakat pedesaan cukup luwes, dalam arti dapat bekerja lebih dari satu jenis kegiatan. Hal ini memungkinkan RT yang bersangkutan menjaga stabilitas pendapatannya.

Variasi jumlah RT yang bekerja pada kegiatan non-usahatani juga dapat dilihat berdasarkan luas garapan (Tabel 2). Nampak bahwa di daerah padi, jumlah RT tidak bertamah jauh lebih banyak daripada di daerah non-padi dan mereka seluruhnya bekerja pada kegiatan non-usahatani. Disamping itu terlihat pula bahwa semakin luas kelas garapan lahan, ada kecenderungan semakin kecil persentase RT yang bekerja pada kegiatan non-usahatani.

Tabel 2. Jumlah Rumah Tangga Contoh Yang Bekerja Pada Kegiatan Diluar Usahatani Menurut Luas Garapan*).

Luas Garapan (Ha)	Daerah padi		Daerah non padi		Agregat	
	n_s	n_k	n_s	n_k	n_s	n_k
0	121	100	47	100	168	100
0,001 - 0,499	151	87	184	88	335	87
0,500 - 0,999	100	86	93	80	193	83
1,000 - 1,499	34	65	54	70	88	68
1,500 - 1,999	21	52	30	67	51	61
2,000 - 2,499	9	22	11	73	20	50
2,500 - 2,999	4	50	10	60	14	57
$\geq 3,000$	11	64	21	62	32	62
Total	449	85	450	82	899	83

Keterangan: *) n_s = jumlah rumah tangga contoh, n_k = persentase rumah tangga contoh yang bekerja non usaha tani.

Umumnya dapat dikatakan bahwa bagi RT yang mempunyai garapan, persentase yang bekerja non-usahatani di daerah non-padi lebih besar daripada di daerah padi. Hal ini disebabkan karena di daerah non-padi pada umumnya pendapatan usahatani persatuan luas lebih kecil daripada di daerah padi.

Jenis Kegiatan Non-Usahatani

Berburuh Tani

Secara umum dapat dikatakan bahwa jenis kegiatan yang paling banyak menyerap TK adalah mencangkul, baik di daerah padi maupun non-padi (Tabel 3). Tetapi di daerah non-padi, pekerjaan mencangkul secara relatif jauh lebih penting daripada di daerah padi, karena di daerah padi keadaan irigasinya lebih baik yang memungkinkan pengolahan tanah dengan bajak. Pengolahan tanah dengan bajak, lebih sedikit memerlukan tenaga manusia daripada dengan mencangkul.

Tabel 3. Peranan Masing-masing Jenis Kegiatan Sektor Pertanian Berdasarkan Penyerapan Hari Kerja Berburuh Tani Seluruh Rumah Tangga Contoh.

Jenis Kegiatan	Pencurahan Hari Kerja (%)		
	Daerah padi	Daerah non-padi	Agregat
Mencangkul	20,1	44,3	25,8
Membajak/garu	4,4	3,4	4,2
Menanam	18,7	16,2	18,1
Menyiang	16,9	9,3	15,1
Memupuk	1,6	0,8	1,4
Panen	21,5	13,8	19,7
Buruh peternakan	2,4	3,4	2,6
Lain-lain	14,4	8,8	13,1
Total: %	100,0	100,0	100,0
HKO	70.790	28.334	99.124

Jenis pekerjaan lain yang cukup menonjol adalah menanam, menyiang dan terutama panen. Di daerah padi, persentase ketiga jenis kegiatan tersebut lebih tinggi daripada di daerah non-padi, karena intensitas pengusahaan lahan di daerah padi lebih tinggi dari pada di daerah non-padi.

Tampak bahwa jumlah hari kerja RT contoh yang terserap pada kegiatan berburuh tani secara keseluruhan di daerah padi sebesar 2,5 kali lebih daripada di daerah non-padi. Hal ini menunjukkan bahwa kesempatan kerja berburuh tani di daerah padi jauh lebih banyak daripada di daerah non-padi.

Berburuh non-pertanian

Variasi jenis kegiatan berburuh non-pertanian cukup banyak (Tabel 4). Di daerah padi, kegiatan yang paling menonjol adalah pertukangan, terutama tukang tembok dan di samping itu sebagai kuli kasar/pikul dan buruh angkutan juga cukup penting. Sedangkan di daerah non-padi, kegiatan yang paling menonjol adalah kuli kasar/pikul dan selain itu sebagai pembantu RT dan buruh angkutan juga cukup banyak. Pencurahan TK secara agregat terdapat kesamaan pola dengan daerah padi. Pada umumnya curahan TK dalam bidang industri masih sangat sedikit.

Kegiatan buruh non-pertanian di daerah padi mampu menyerap hari kerja sebanyak 2,7 kali daerah non-padi. Ini menunjukkan bahwa kegiatan berburuh non-pertanian di daerah padi jauh lebih berkembang daripada di daerah non-padi.

Usaha non-pertanian

Jumlah pencurahan hari kerja kegiatan usaha non-pertanian seluruh RT contoh di daerah padi sekitar dua kali jumlah pencurahan hari kerja di daerah non-padi (Tabel 5). Hal ini menunjukkan bahwa di daerah padi kesempatan kerja

Tabel 4. Peranan Masing-masing Jenis Kegiatan Berburuh Non Pertanian Dalam Menyerap Tenaga Kerja Rumah Tangga Contoh.

Jenis Kegiatan	Pencurahan tenaga kerja (%)		
	Daerah padi	Daerah non-padi	Agregat
Tukang tembok/batu	19,2	10,2	16,8
Tukang kayu	7,1	10,5	8,0
Kuli pasar/pikul	13,1	24,2	16,1
Pelayan toko/warung	6,6	2,7	5,5
Pembantu rumah tangga	8,2	11,6	9,1
Buruh angkutan	12,2	11,5	12,0
Menggergaji	2,3	9,4	4,2
Buruh PTP/Perhutani	7,1	1,2	5,5
Buruh jahit	3,9	5,8	4,4
Buruh huller	1,9	0,1	1,4
Lain-lain	18,4	12,8	17,0
Total: %	100,0	100,0	100,0
HKO	25.499	9.456	34.955

Tabel 5. Peranan Masing-masing Jenis Kegiatan Usaha Non Pertanian Berdasarkan Penyerapan Tenaga Kerja Seluruh Rumah Tangga Contoh.

Jenis Kegiatan	Pencurahan hari kerja (%)		
	Daerah padi	Daerah non-padi	Agregat
Industri	7,1	2,0	5,4
D a g a n g	39,6	26,0	35,0
J a s a	12,7	12,3	12,6
Ekstraksi	10,0	44,2	21,5
Pegawai	30,6	15,5	25,5
Total: %	100,0	100,0	100,0
HKO	75.975	38.294	114.269

usaha non-pertanian jauh lebih berkembang daripada di daerah non-padi. Ini disebabkan karena di daerah padi tingkat produksi dan pendapatan pertanian cukup tinggi, yang diikuti oleh kegiatan transaksi ekonomi yang lebih besar relatif terhadap daerah non-padi.

Di daerah padi kegiatan industri, dagang, jasa dan pegawai lebih tinggi daripada di daerah non-padi, tetapi usaha ekstraksi jauh lebih sedikit. Sebaliknya kesempatan kerja usaha non-pertanian yang paling banyak di daerah non-padi adalah usaha ekstraksi (mencari barang dalam bebas), seperti mencari hasil hutan, menggali pasir, batu, dan lain-lain, sedangkan kegiatan lain kurang.

Perbandingan Antar Jenis Kegiatan Non-Usahatani

Ada kesamaan antara daerah padi dan non-padi, yaitu bahwa peranan kegiatan non-pertanian lebih besar daripada kegiatan berburuh tani (Tabel 6). Hanya secara relatif penyerapan hari kerja non-pertanian di daerah non-padi sedikit lebih tinggi daripada di daerah padi. Kesamaan yang lain adalah bahwa peranan kegiatan usaha non-pertanian jauh lebih besar daripada kegiatan berburuh non-pertanian.

Tabel 6. Peranan Masing-masing Jenis Kegiatan Non-Usahatani.

Jenis Kegiatan	Daerah padi		Daerah non-padi		Agregat	
	HKO	%	HKO	%	HKO	%
Berburuh tani	70.790	48,2	28.334	42,5	99.124	46,5
Non-Pertanian	75.975	51,8	38.294	57,5	114.269	53,5
a. Berburuh	25.499	17,4	9.456	14,2	34.955	16,4
b. Usaha	50.476	34,4	28.836	43,3	79.314	37,2
Non-Usahatani	146.765	100,0	66.628	100,0	213.393	100,0

Secara agregat juga demikian, bahwa peranan kegiatan non-pertanian lebih besar daripada berburuh dan diantara kegiatan non-pertanian maka peranan kegiatan usaha lebih besar daripada berburuh.

Pencurahan Tenaga Kerja Spatial

Informasi mengenai pencurahan TK secara spatial akan dapat memberikan gambaran mengenai kemana RT contoh bergerak untuk bekerja. Didapatkan bahwa, sebagian besar kegiatan berburuh tani dilakukan dalam desa sendiri, baik di daerah padi maupun di daerah non-padi (Tabel 7). Hanya peranan relatif berburuh tani dalam desa sendiri di daerah non-padi lebih kecil daripada di daerah padi. Hal ini disebabkan karena kesempatan kerja berburuh tani di daerah non-padi lebih sedikit dan RT cenderung bergerak keluar untuk berburuh tani ke desa lain.

Kecenderungan yang hampir sama juga terjadi pada kegiatan usaha non-pertanian, bahwa sebagian besar kegiatan usaha non-pertanian dilakukan dalam desa sendiri. Keadaan yang sebaliknya terjadi pada kegiatan berburuh non-pertanian, dimana kegiatan ini lebih banyak dilakukan diluar desa daripada dalam desa sendiri, terutama di desa lain.

Secara agregat juga nampak bahwa sebagian besar kegiatan non usahatani masih lebih banyak dilakukan di dalam desa sendiri, walaupun peranan kota dan desa lain juga cukup penting sebagai alternatif spatial untuk memperoleh tambahan atau menjaga stabilitas pendapatan RT pedesaan. Kalau diperbandingkan antara desa padi dan desa non-padi, maka nampak ada perbedaan dalam tekanan spatial. Di daerah padi, secara relatif orientasi ke kota untuk kegiatan non-pertanian lebih kuat daripada di daerah non-padi.

Tabel 7. Jumlah Pencurahan Hari Kerja Spatial Seluruh Responden pada Kegiatan non-Usahatani (%).

Lokasi Kerja	Daerah padi	Daerah non-padi	Agregat
Buruh tani			
a. Dalam desa	81	73	79
b. Desa lain	19	27	21
Non-Pertanian			
— Buruh :			
a. Dalam desa	37	40	38
b. Desa lain	36	39	37
c. Kota	27	21	25
— Usaha :			
a. Dalam desa	58	63	60
b. Desa lain	18	15	17
c. Kota	24	22	23
— Total :			
a. Dalam desa	51	58	53
b. Desa lain	24	22	23
c. Kota	25	20	24
Non-Usahatani			
a. Dalam desa	62	64	63
b. Desa lain	15	25	18
c. Kota	23	11	19

Pencurahan Hari Kerja dan Pendapatan Rumah Tangga

Di daerah padi rata-rata pencurahan hari kerja per RT untuk seluruh kegiatan non-usahatani sebesar 2 kali lebih dari daerah non-padi (Tabel 8). Hal ini logis, seperti telah dikemukakan sebelumnya, bahwa kegiatan non-usahatani di daerah padi lebih berkembang daripada di daerah non-padi.

Tabel 8. Rata-rata Pencurahan Hari Kerja dan Pendapatan Bersih Per Rumah Tangga Contoh Pada Kegiatan Diluar Usahatani Berdasarkan Kelas Luas Garapan.

Luas Garapan (Ha)	Daerah padi			Daerah non-padi			Agregat		
	n _k	HKO	Rp'000	n _k	HKO	Rp'000	n _k	HKO	Rp'000
0	121	459	381	47	255	187	168	402	327
0,001-0,499	132	392	340	161	191	104	293	282	210
0,500-0,999	86	323	270	74	167	88	160	251	186
1,000-1,499	22	329	387	38	163	118	60	224	217
1,500-1,999	11	219	306	20	147	82	31	173	161
2,000-2,499	2	98	45	8	97	65	10	97	61
2,500-2,999	2	261	418	6	81	35	8	126	131
3,000	7	197	378	13	99	48	20	133	164
Rata-rata: n _k	383	383	321	367	185	108	750	286	191
n	449	327	274	450	148	88	899	237	114

Variasi pencurahan TK per RT juga dapat dilihat menurut variasi luas garapan (Tabel 8). Nampak ada kecenderungan yang serupa antara daerah padi dan daerah non-padi, yaitu makin luas kelas garapan lahan, cenderung makin kecil pencurahan TK per RT. Sedangkan perbedaannya adalah bahwa pada setiap kelas luas garapan, rata-rata pencurahan tenaga kerja per RT di desa padi selalu lebih besar daripada di daerah non-padi.

Pendapatan bersih rata-rata per RT di daerah padi sebesar 3 kali daerah non-padi (Tabel 8). Bila dibandingkan dengan pencurahan TK yang besarnya 2 kali, maka berarti pendapatan bersih per hko di daerah padi rata-rata sebesar 1,5 kali di daerah non-padi.

Variasi pendapatan per RT berdasarkan variasi luas garapan, agak konsisten dengan variasi dengan pencurahan TK untuk daerah non-padi, bahwa makin luas lahan garapan, makin kecil pendapatannya. Di daerah padi kadar konsistensi tersebut lebih rendah. Namun secara agregat masih cukup konsisten, yakni makin luas lahan garapan cenderung makin kecil pendapatannya.

Pencurahan Tenaga Kerja dan Pendapatan Non-Usahatani

Analisa kuantitatif hubungan antara pencurahan TK dan pendapatan pada kegiatan non usahatani dengan faktor-faktor yang mempengaruhi dilakukan untuk: (1) berburuh tani, (2) berburuh non-pertanian, dan (3) usaha non-pertanian. Hasil disajikan pada Tabel 9.

Berburuh tani

Pencurahan TK dan pendapatan berburuh tani per RT di daerah padi lebih tinggi daripada di daerah non-padi menunjukkan bahwa kesempatan kerja di daerah padi lebih tinggi daripada di daerah non-padi. Di daerah yang menggunakan traktor untuk mengolah tanah, pencurahan TK berburuh tani lebih rendah daripada di daerah yang tidak menggunakan traktor. Ini menunjukkan bahwa penggunaan traktor tersebut bersifat mengganti TK manusia untuk mengolah tanah (Sinaga, 1978 dikutip oleh White, 1978). Pada umumnya masuknya alat mekanis ini disebabkan oleh kelangkaan TK.

Faktor-faktor lain yang berpengaruh secara nyata terhadap pencurahan TK berburuh tani adalah luas garapan, keadaan irigasi, kepadatan penduduk agraris dan aksesibilitas desa. Sedangkan faktor jumlah anggota keluarga, upah, distribusi luas garapan, kemajuan ekonomi desa dan pendidikan tidak berpengaruh nyata.

RT yang memiliki lahan garapan luas cenderung mengurangi pencurahan TK dan pendapatan berburuh tani, bahkan di daerah padi kecenderungan itu lebih kuat dari pada di daerah non-padi. Ini disebabkan karena makin luas lahan garapan makin tinggi pendapatan usahatani dan petani cenderung mengurangi kegiatan yang berbau 'kasar' dan di daerah padi dengan luas yang sama akan mempunyai pendapatan yang lebih tinggi dari pada di daerah non-padi. Di daerah

Tabel 9. Parameter Hubungan Antara Pencurahan Tenaga Kerja dan Pendapatan Kegiatan Non-Usahatani Dengan Faktor-faktor Yang Mempengaruhinya.

Parameter	Pencurahan hari kerja			Pendapatan		
	Berburuh tani	Berburuh non per-tanian	Usaha non per-tanian	Berburuh tani	Berburuh non per-tanian	Usaha non per-tanian
a_0	1,673***	1,389***	1,590***	1,673***	1,389***	1,590***
a_p	7,131***	3,843***	6,566***	7,131***	3,843***	6,566***
a_t	-2,199***	—	2,507***	-2,199***	—	2,507***
a_e	—	—	—	—	—	—
Fm : b_1	—	—	0,671***	—	—	0,671***
b_1'	—	—	-0,499**	—	—	-0,499**
L : b_2	-0,158***	—	—	-0,158***	—	—
b_2'	-0,086**	—	0,209*	-0,086**	—	0,209*
W : b_3	—	—	—	1,053***	0,771***	1,066***
b_3'	—	—	—	—	—	—
IF : b_4	0,248***	0,103***	0,147***	0,248***	0,103***	0,147***
b_4'	—	0,201***	0,116***	—	0,201***	0,116***
GI : b_5	—	2,017***	2,442***	—	2,017***	2,442***
b_5'	—	—	—	—	—	—
EI : b_6	—	—	0,968***	—	—	0,968***
b_6'	—	—	1,310***	—	—	1,310***
P : b_7	-0,603***	-0,724**	-1,361***	-0,603**	-0,724**	-1,361***
b_7'	-2,474***	—	—	-2,474***	—	—
Sr : b_8	-0,613**	—	—	-0,613***	—	—
b_8'	-0,838**	—	—	-0,838**	—	—
R^2	0,329	0,287	0,393	0,569	0,414	0,781
F	11,996***	5,203***	9,665***	33,806***	10,285***	44,122***
n	521	287	326	521	287	326

Keterangan: Fm = Jumlah anggota RT; L = Luas garapan lahan; W = Pendapatan bersih per hko; IF = Persentase lahan beririgasi; GI = Gini-index garapan lahan; EI = Jumlah lembaga ekonomi desa; P = Tingkat pendapatan penduduk agraris; Sr = Jarak desa ke pusat kabupaten terdekat.

***) = 1%; **) 2-5%; *) 6-10%.

pedesaan cenderung makin banyak RT yang tidak bertanah (Wiradi dan Makali, 1983) dan ini menjadi faktor pendorong bagi RT pedesaan untuk berburuh tani.

Di daerah yang fasilitas irigasinya lebih baik, pencurahan TK cenderung lebih besar atau tidak ada fasilitas irigasinya. Ini disebabkan karena di daerah beririgasi baik, intensitas tanam dan pemeliharaan lebih tinggi daripada di daerah beririgasi kurang baik sehingga permintaan TK lebih banyak, baik di daerah padi maupun non-padi.

Makin tinggi kepadatan penduduk agraris menyebabkan pencurahan TK dan pendapatan berburuh tani makin rendah, terlebih-lebih di daerah padi dimana tingkat kepadatan penduduknya lebih tinggi daripada di daerah non-padi. Ini

disebabkan karena makin tinggi kepadatan penduduk agraris, jumlah AK yang berebut kesempatan kerja berburuh tani makin banyak, sehingga bagian yang diperoleh per RT makin kecil pula. Ini merupakan bukti kuat bahwa di daerah yang padat penduduk, lahan pertanian sudah tidak mampu lagi menampung TK. Di daerah Jawa Timur tingkat kepadatan penduduk pada umumnya tinggi dan akan makin tinggi. Hasil analisa fungsi produksi juga menunjukkan bahwa elastisitas TK terhadap produksi padi sudah tidak nyata, yang berarti bahwa sebagian TK yang digunakan pada usahatani sebenarnya sudah tidak produktif (Saleh & Somantri, 1985). Dengan kata lain sudah terjadi pengangguran terselubung dan bahkan kelebihan TK. Apabila TK ini ditambah lagi, maka surplus petani akan makin kecil lagi (Ranis & Fei dalam Sukirno, 1978).

Makin jauh letak desa dari jalan aspal, berarti aksesibilitas desa makin buruk, maka RT pedesaan cenderung mengurangi pencurahan tenaga dan pendapatan berburuh tani, terlebih-lebih di daerah padi. Telah diulas sebelumnya bahwa sebagian kegiatan berburuh tani dilakukan di desa lain. Apabila prasarana transpor makin buruk, maka biaya untuk bekerja di desa lain makin tinggi, sedangkan upah buruhtani pada umumnya rendah. Di daerah padi kecenderungan mengurangi kegiatan berburuh tani di desa lain lebih besar karena kesempatan kerja di desa sendiri cukup besar daripada di daerah non-padi.

Faktor upah tidak berpengaruh kepada pencurahan TK, tetapi berpengaruh positif sangat nyata terhadap pendapatan berburuh tani, baik di daerah padi maupun non-padi. Ini disebabkan karena kesempatan kerja di daerah pedesaan memang terbatas. Tetapi setiap kenaikan upah akan menaikkan pendapatan berburuh tani.

Berburuh non-pertanian

Pencurahan TK dan pendapatan berburuh non pertanian juga lebih tinggi di daerah padi daripada di daerah non-padi. Ini menunjukkan bahwa kesempatan kerja berburuh non-pertanian lebih tinggi di daerah padi daripada di daerah non-padi (Tabel 7).

Makin baik keadaan irigasi, makin tinggi pencurahan TK dan berburuh non-pertanian, terutama di daerah padi. Ini disebabkan karena makin baik keadaan irigasi, makin tinggi pula produksi pertanian dan pendapatan RT pedesaan dari usaha tani. Lebih lanjut hal ini merangsang meningkatnya transaksi ekonomi, baik menyangkut masukan dan keluaran pertanian maupun kebutuhan RT sehari-hari dan untuk itu diperlukan TK buruh yang makin banyak.

Makin timpang distribusi luas garapan suatu desa, merangsang RT di desa itu untuk mencurahkan TK dan pendapatan berburuh non-pertanian lebih banyak, baik di daerah padi maupun non-padi. Hal ini disebabkan karena kesempatan berusaha makin kecil dan oleh karena itu mencari kegiatan lain yaitu berburuh non-pertanian dan juga usaha non-pertanian. Ketimpangan luas garapan ini

cenderung meningkat (Prajogo, 1983 dan Mintoro, 1983), berarti merupakan faktor pendorong AK untuk berburuh non-pertanian.

Seperti halnya pada kegiatan berburuh tani, maka makin tinggi kepadatan penduduk, pencurahan TK dan pendapatan berburuh non-pertanian cenderung menurun, baik di daerah padi maupun non-padi. Tidak lain karena daya tampung sektor non-pertanian dan sektor pertanian tidak sepadan dengan meningkatnya jumlah penduduk, sehingga kesempatan kerja yang diperoleh per RT makin kecil.

Upah berburuh non-pertanian tidak berpengaruh terhadap pencurahan TK, tetapi berpengaruh nyata terhadap pendapatan berburuh non-pertanian, tetapi elastisitasnya kurang dari 1.

Usaha non-pertanian

Seperti halnya pada kegiatan berburuh tani dan berburuh non-pertanian, maka pencurahan TK dan pendapatan usaha non-pertanian di daerah padi jauh lebih besar daripada di daerah non-padi. Hal ini disebabkan karena produksi dan pendapatan RT dari usahatani di daerah padi lebih tinggi daripada di daerah non-padi sehingga secara ekonomis mampu mengembangkan usahanya meliputi kegiatan usaha non-pertanian.

Di daerah yang mengolah tanahnya dengan traktor, memang mengurangi kesempatan kerja berburuh tani. Akibatnya RT pedesaan pindah keusaha non-pertanian, bahkan elastisitas meningkatnya pencurahan TK dan pendapatan usaha non-pertanian lebih tinggi daripada elastisitas menurunnya pencurahan TK dan pendapatan berburuh tani. Ini adalah positif, karena pengolahan tanah dapat dilakukan secara efisien dan usaha non-pertanian makin berkembang.

Anggota RT cenderung lebih berorientasi kepada usaha non-pertanian, bukan berburuh tani atau berburuh non-pertanian. Faktor penyebabnya mungkin adalah motivasi AK, terutama tenaga muda yang cenderung menghindari pekerjaan berbau 'kuli kasar'. Kecenderungan demikian juga disinyalir dalam penelitian sebelumnya (Soentoro, 1983 dan Mantra, 1985). Tetapi untuk di daerah padi, kecenderungan itu lebih kecil, diduga bahwa di daerah padi kaum muda lebih diarahkan untuk sekolah sedangkan di daerah non-padi lebih dicurahkan untuk bekerja mencari nafkah.

Luas garapan di daerah non-padi tidak berpengaruh terhadap pencurahan TK dan pendapatan usaha non-pertanian, tetapi positif nyata di daerah padi. Hal ini menunjukkan bahwa di daerah padi, petani yang memiliki lahan luas cenderung melakukan reinvestasi surplus usahatannya pada usaha non-pertanian. Hasil penelitian sebelumnya juga menyimpulkan bahwa di daerah yang subur, makin luas garapannya makin besar pula pendapatan non-pertanian, sedangkan di daerah kurang subur tidak berpengaruh (Mintoro, 1983).

Di daerah yang beririgasi lebih baik, pencurahan TK dan pendapatan usaha non-pertanian cenderung makin besar dan kecenderungan itu lebih besar lagi

untuk daerah padi. Ini disebabkan karena di daerah beririgasi baik, produksi dan pendapatan RT lebih tinggi daripada di daerah yang irigasinya kurang baik. Lebih lanjut hal ini merangsang meningkatnya kegiatan transaksi ekonomi, baik yang menyangkut masukan dan keluaran pertanian maupun permintaan konsumsi RT.

Seperti halnya pada kegiatan berburuh non-pertanian, maka makin tinggi ketimpangan luas garapan merangsang meningkatnya usaha non-pertanian. Bagi RT tak bertanah atau petani kecil, maka usaha non-pertanian yang umumnya bersifat informal merupakan usaha yang cukup aman untuk menopang kebutuhan RT. Demikian juga bagi yang lahan garapannya luas, tetapi pendapatan yang diperoleh dari usaha ini lebih besar untuk petani luas karena kemampuan modal yang lebih tinggi. Kecenderungan yang terjadi adalah bahwa ketimpangan luas garapan cenderung meningkat (Prajogo 1983 dan Mintoro 1983). Hal ini akan merupakan faktor pendorong RT pedesaan untuk melakukan usaha non-pertanian.

Makin banyak jumlah lembaga ekonomi desa seperti KUD/BUUD, warung, kios, toko, unit usaha pengolahan hasil pertanian (huller, tahu/tempe, dan lain-lain) merupakan indikasi bahwa desa itu makin maju kegiatan ekonominya. Di daerah yang tinggi kegiatan ekonominya, maka pencurahan TK dan pendapatan usaha non-pertaniannya makin besar. Logis karena kegiatan lembaga ekonomi itu adalah kegiatan usaha non-pertanian. Kecenderungan itu lebih besar lagi di daerah padi. Hal tersebut membuktikan, bahwa apabila kegiatan ekonomi dalam desa sendiri cukup berkembang, maka kesempatan kerja juga berkembang dan laju urbanisasi mungkin dapat dikurangi.

Faktor asesibilitas desa tidak berpengaruh pada kegiatan usaha non-pertanian karena AK dapat melakukan sirkulasi desa-kota. Pada musim santai disektor pertanian, AK dapat pergi ke kota untuk usaha atau berburuh non-pertanian. Mereka dapat menyewa sebuah rumah sederhana bersama-sama dan masak bersama sehingga biaya hidup dikota dapat ditekan. Pada waktu musim sibuk mereka ada yang kembali ke desa untuk bekerja dipertanian.

Faktor pendapatan bersih per hari kerja orang tidak mempengaruhi pencurahan TK usaha non-pertanian, tetapi mempunyai pengaruh positif terhadap total pendapatannya.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Kesimpulan

Sebagian besar RT yang diteliti bekerja pada kegiatan non-usahatani dari berbagai kombinasi antara berburuh tani, berburuh non-pertanian dan usaha non-pertanian. Banyak diantara RT contoh bekerja rangkap. Ini menunjukkan bahwa kegiatan diluar usahatani sangat penting bagi RT pedesaan.

Total pencurahan TK seluruh RT contoh yang paling banyak adalah pada kegiatan berburuh tani jika dibandingkan kegiatan berburuh non-pertanian atau usaha non-pertanian. Tetapi non-pertanian secara keseluruhan masih lebih besar daripada berburuh tani. Di daerah padi total pencurahan TK non-usahatani jauh lebih besar daripada di daerah non-padi.

Jenis kegiatan berburuh tani yang penting adalah mencangkul, menanam, menyang dan memanen, terutama mencangkul. Penggunaan traktor hanya terdapat di 2 desa contoh. Untuk kegiatan berburuh non-pertanian yang paling menonjol adalah sebagai tukang tembok/batu, tukang kayu dan kuli pasir/pikul dan buruh angkutan. Sedangkan jenis usaha non-pertanian yang menonjol adalah dagang. Industri, jasa dan lain-lain masih terbatas.

Peranan desa sendiri secara umum masih jauh lebih dominan dalam menyerap TK, terutama kegiatan berburuh tani dan usaha non-pertanian. Sedangkan kegiatan berburuh non-pertanian lebih menonjol di luar desa. Kota juga telah cukup berperan dalam menyerap TK dan RT pedesaan, baik untuk kegiatan berburuh non-pertanian maupun usaha non-pertanian.

Rata-rata pencurahan TK non-usahatani di daerah padi adalah 383 hko per RT per tahun, sedangkan di daerah non-padi jauh lebih kecil yaitu 185 hko atau secara agregat adalah 286 hko. Demikian juga pendapatan bersih rata-rata per RT di daerah padi jauh lebih tinggi daripada non-padi, masing-masing Rp 321.000 dan Rp 108.000 per tahun atau Rp 217.000 secara agregat.

Traktor bersifat mengganti TK pencangkul, tetapi di desa yang diteliti ini AK dapat pindah ke usaha non-pertanian dan ini dapat dipandang positif. Dilain pihak faktor kepadatan penduduk agraris merupakan faktor yang paling buruk pengaruhnya karena ia dapat menurunkan jumlah kesempatan ekonomi yang dapat diperoleh tiap RT pedesaan, baik berburuh tani, berburuh non-pertanian maupun usaha non-pertanian sebagai akibat persaingan yang makin tajam antar RT.

Keadaan irigasi mempunyai pengaruh yang positif dalam penciptaan kesempatan kerja dan pendapatan, baik secara langsung terhadap kegiatan berburuh tani maupun secara tidak langsung terhadap kegiatan non-pertanian (berburuh dan usaha), terutama di daerah padi. Demikian pula, makin tinggi ketimpangan distribusi luas garapan menyebabkan pencurahan TK dan pendapatan non-pertanian (berburuh dan usaha) makin tinggi karena kesempatan berusaha-tani makin kecil.

Desa dengan tingkat kemajuan ekonomi yang lebih tinggi mampu menciptakan kesempatan kerja usaha non-pertanian yang lebih tinggi, terutama di daerah padi. Hal ini juga akan mengerem laju urbanisasi ke desa. Dan asesibilitas desa bukan lagi merupakan faktor penghambat AK untuk bergerak dari desa ke kota untuk mencari nafkah karena mereka dapat melakukan sirkulasi. Sedangkan

untuk berburuh ke desa lain faktor aksesibilitas sangat penting karena buruh tani hanya berkomutasi.

Pendapatan bersih per hko tidak mempengaruhi pencurahan TK berburuh tani, berburuh non-pertanian maupun usaha non-pertanian, karena tidak banyak pilihan yang harus diambil. Tetapi faktor ini berpengaruh positif terhadap pendapatan per RT pada ketiga jenis kegiatan tersebut.

Implikasi Kebijakan

Penempatan traktor untuk mengolah tanah, seyogyanya didasarkan atas kekurangan tenaga pada periode puncak atau di desa yang AK sudah banyak bekerja pada kegiatan non-pertanian. Di samping itu pengendalian jumlah penduduk melalui promosi program keluarga berencana (KB) harus tetap digalakan karena faktor tekanan penduduk mempunyai pengaruh yang paling buruk.

Usaha-usaha peningkatan intensitas tanam perlu ditekuni terus, misalnya dengan membangun dan atau merehabilitasi prasarana irigasi di daerah yang memungkinkan untuk itu. Seperti diketahui kecenderungan meningkatnya ketimpangan luas garapan nampaknya tidak mudah dicegah, karena adanya petani yang melepaskan tanahnya dan ada petani yang mengakumulasi tanahnya. Usaha yang sering dianjurkan adalah perlunya dilakukan 'land reform' dan 'capital reform' disertai kemauan politik yang sungguh-sungguh.

Pembangunan industri dan jasa seyogyanya tidak terlalu dipusatkan di kota, agar perbedaan kemajuan antara perkotaan dan pedesaan tidak makin menyolok. Desa yang tinggi kegiatan ekonominya ternyata mampu menahan AK pedesaan untuk melakukan usaha di desa. Hal ini guna mencegah urbanisasi yang berlebihan dan hilangnya tenaga-tenaga terampil dan potensial di daerah pedesaan. Faktor terpenting yang merangsang urbanisasi adalah pertimbangan ekonomi dengan harapan memperoleh kesempatan kerja dan pendapatan yang lebih tinggi. Karena itu pemerintah perlu melakukan atau mendorong investasi non-pertanian di daerah pedesaan, menciptakan 'elite entrepreneur' dan 'skilled man's frontier' di pedesaan dalam jangka panjang.

Mengingat bahwa jumlah penduduk berlimpah, maka perlu dipertimbangkan pemilihan investasi yang menggunakan teknologi madya, yaitu teknologi yang mempunyai kemampuan untuk menaikkan produksi dengan cepat maupun menciptakan kesempatan kerja yang cukup besar. Industri yang demikian antara lain adalah: pengolahan bahan makanan, tekstil, konstruksi dan perakitan. Pembangunan industri pertanian (agro industry) di daerah pedesaan, diharapkan akan dapat membantu meningkatkan kesempatan kerja di pedesaan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Chadha, G.K., Off-farm Economic Structure of Agriculturally Growing Regions: Study of Indian Punjab, 1984.
- Hadi, Prajogo Utomo, Perubahan Distribusi Luas Garapan dan Pendapatan di Daerah Kantung Produksi Padi, (Forum Penelitian Agro Ekonomi, vol. 3 no. 1 Juli 1984).
- Johnston, J., Econometric Methods, Second Edition (Tokyo: Mc Graw-Hill Kogakusha, Ltd., 1972).
- Kasryno, Faisal, Kerangka Analisa Ekonomi Masalah Pedesaan (Studi Dinamika Pedesaan Survey Agro Ekonomi, 1983).
- Mintoro, Penyerapan Tenaga Kerja luar Sektor Pertanian (Studi Dinamika Pedesaan - Survey Agro Ekonomi, 1983).
- Mantra, Ida Bagus, Kependudukan, Transmigrasi dan Pangan. Bahan Penataran Analisa Kebijakan-an Pertanian dan Metoda Perencanaan, Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, 1985.
- Sukirno, Sadono, Ekonomi Pembangunan, Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan-an (Medan: Borta Gorat, 1978).
- Supranto, J., Ekonometrik, Buku Dua (Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1984).
- Saleh, Chaerul dan Riyadi A. Somantri, Pola Tanam dan Analisa Usahatani di Pedesaan Jawa Timur, Dalam Seminar Pusat Penelitian Agro Ekonomi, 19-20 Desember 1985 di Bogor.
- Soentoro, Penyerapan Tenaga Kerja Luar Sektor Pertanian. (Studi Dinamika Pedesaan - Survey Agro Ekonomi, 1983).
- Todaro, Michael P., Economic Development in the Third World (London and New York: Longman, 1978).
- White, Benyamin, Political Aspects of Poverty, Income Distribution and Their Measurement: Some Examples From Rural Java (Bogor: Rural Dynamics Series No. 5, 1978).
- Wiradi, Gunawan dan Makali, Penguasaan Tanah dan Kelembagaan (Studi Dinamika Pedesaan - Survey Agro Ekonomi, 1983).